

Kabupaten Bengkulu Utara

Sumber : Rakyat Bengkulu/Bengkulu Ekspres/Radar Bengkulu/Kompas/Media Indonesia

Tanggal : 09 / 04 / 2018

Anarulita Janjikan DD Naik



Anggota DPR RI Dapil Provinsi Bengkulu, dr Anarulita Muchtar menjadi pemateri Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Siskeudes di gedung Pertemuan Balai Ratu Samban Kecamatan Kota Arga Makmur, Kamis (9/4).

ARGA MAKMUR, BE-nggota DPR RI Dapil Provinsi Bengkulu, dr Anarulita Muchtar menekankan agar penggunaan Dana Desa (DD) dilakukan

dengan baik dalam segala bidang. Baik segi pembangunan maupun laporan pertanggungjawabannya. Menurutny, jika laporannya

baik, maka pemerintah pusat akan menambah DD yang diterima ditahun berikutnya. "Kalau dikelola dengan baik, laporannya juga baik,

Insyaallah tahun depan Dana Desa yang diterima akan meningkat," ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Bidang Pengawasan Pengelolaan DD untuk Kabupaten Bengkulu Utara (BU) dan Kaur ini meminta agar seluruh desa benar-benar serius dalam pengelolaan DD. Hal ini untuk menghindari kepala desa (kades) dan unsur pemerintahan desa lainnya tersandung kasus hukum.

"Pengelolaan Dana Desa itu tergantung niatnya. Kalau memang niatnya baik, pelaksanaannya sesuai dengan hasil aspirasi masyarakat melalui musyawarah dan pembangunan sesuai standar, saya rasa tidak akan ada masalah," ungkapnya.

Politisi Nasdem ini juga mengaku akan memperjuangkan peningkatan DD untuk Provinsi Bengkulu. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab), kecamatan hingga desa harus konsisten dengan pelaporan seluruh penggunaan DD itu baik.

"Kita sudah perjuangkan

untuk kenaikan DD khususnya di Provinsi Bengkulu di pusat. Pak Presiden juga sudah menyampaikan akan ada kenaikan DD di tahun depan. Tapi, kuncinya pelaporan penggunaan DD harus baik," terangnya. Sebelumnya, Bupati BU, Ir Mian juga menegaskan agar setiap desa dapat menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel dalam pengelolaan DD.

"Setiap kades harus mengelola DD dengan baik, bersih dan akuntabel," tuturnya.

Bupati mengaku, Pemkab BU sudah mengeluarkan segala aturan, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dalam pengelolaan DD dan Alokasi DD (ADD) tahun 2018 yang jumlahnya mencapai Rp 200 Miliar. Jika pemerintah desa mengikuti itu, maka tidak akan ada persoalan dalam pengelolaan DD.

"Kalau dikelola sesuai aturan, kita pastikan tidak ada masalah dalam pengelolaan dana desa," pungkasnya. (816)